

KOLABORASI *STAKEHOLDER* DALAM PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN DI KOTA SURABAYA: PERSPEKTIF *PENTAHHELIX*

Anita Paulyna^{1(a)}, Moses Glorino Rumambo Pandin^{2(b)} Christrijogo Soemartono
Waloejo^{1,3(c)}

^{1,2}Program Studi Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Airlangga

³Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga .

^{a)}anita.wartaboni@gmail.com, ^{b)}moses.glorino@fib.unair.ac.id, ^{c)}christrijogo@fk.unair.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

12-11-2024

Diterbitkan Online:

31-12-2024

Kata Kunci:

Bencana Kebakaran,
Kolaborasi, Stakeholder,
Pentahelix

ABSTRAK

Kepadatan penduduk di Kota Surabaya menyebabkan tim pemadam kebakaran sulit untuk manjangkau wilayah yang terdampak kebakaran. Luasnya lingkup penangan masalah bencana kebakaran di Kota Surabaya memerlukan kolaborasi antar *stakeholder* dengan baik. Saat ini tidak proses kolaborasi dengan menggunakan konsep *pentahelix* namun beberapa penelitian menunjukkan konsep *pentahelix* sebagai upaya meningkatkan pembangunan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kelemahan kolaborasi *stakeholder* penanganan bencana Kebakaran dan menganalisis serta mendeskripsikan dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif evaluative dengan melibatkan 14 informan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive* sampling terhadap *stakeholder*. Instrumen yang digunakan adalah panduan wawancara. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap pengodean. Hasil penelitian didapatkan belum optimalnya kolaborasi *stakeholder* penanganan bencana kebakaran dikarenakan pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan dan alat keamanan warga belum lengkap, adanya area kosong dan kurang diperhatikannya alang-alang yang berpotensi untuk menimbulkan kebakaran, padatnya lalu lintas kota , kurangnya penataan dan penertiban fasilitas pemukiman warga serta kurangnya ketersediaan unit mobil pemadam kebakaran. Hilangnya pendapatan dan pekerjaan, dan trauma psikologis korban bencana kebakaran adalah dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyarankan agar DPKP dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi dalam penanganan bencana kebakaran. Hal ini harus mencakup pembagian wewenang yang jelas, menganggarkan untuk melengkapi kebutuhan penanganan bencana sehingga membentuk kolaborasi yang efektif.

Keywords:

Collaboration, Stakeholders,
Pentahelix, Fire Disasters

Corresponding Author:

anita.wartaboni@gmail.com

ABSTRACT

The population density in Surabaya City makes it difficult for firefighters to reach areas affected by fires. The wide scope of handling fire disaster problems in Surabaya City requires good collaboration between stakeholders. Currently, there is no collaboration process using the *pentahelix* concept, but several studies show the *pentahelix* concept as an effort to improve development and provide services to the community. The purpose of this study was to analyze the weaknesses of stakeholder collaboration in handling fire disasters and to analyze and describe the economic impacts and community welfare. This research method uses a research design using a qualitative descriptive evaluative approach involving 14 informants. Data collection techniques through interviews and documentation. The sampling technique uses *purposive* sampling of

stakeholders. The instrument used is an interview guide. The data analysis technique is carried out through three stages of coding. The results of the study showed that stakeholder collaboration in handling fire disasters was not optimal due to the implementation and enforcement of health protocols and incomplete citizen safety equipment, the existence of empty areas and lack of attention to the potential for fires, dense city traffic, lack of arrangement and order of residential facilities for residents and the lack of availability of fire engines. Loss of income and jobs, and psychological trauma to victims of fire disasters are the economic and welfare impacts of the community. This study suggests that DPKP can work together better in handling fire disasters. This should include a clear division of authority, budgeting to complete disaster management needs so as to form an effective collaboration.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i4.1197>

PENDAHULUAN

Peninjauan geografi, geologi, dan sosiodemografi, Indonesia terletak pada posisi yang sangat menguntungkan terhadap Bencana. (Fernalia et al., 2023). Seluruh wilayah Indonesia rentan terhadap bencana, baik yang berada di dekat pegunungan, laut, maupun di pusat kota yang padat penduduk. Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang kerap kali mengancam masyarakat yang tinggal di wilayah metropolitan. Lokasi dengan kepadatan penduduk yang tinggi, pusat perdagangan dan industri, serta tempat dengan tata ruang yang justru banyak terdapat permukiman kumuh merupakan area yang memerlukan perhatian segera untuk menanggulangi dan menanggulangi bencana kebakaran (Nugroho et al., 2023).

Wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik padat penduduk adalah Kota Surabaya. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kepadatan penduduk luar biasa yaitu sebanyak 8.958/km². Data Kemendagri (2024) menunjukkan bahwa Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta dan sebelum Bandung. Kawasan industri di Surabaya cukup luas meskipun tidak sebesar Sidoarjo dan Gresik adanya Kawasan industri disebuah daerah sangat berpotensi terjadi *human error* hingga pada akhirnya bisa berpotensi menyebabkan terjadinya bencana kebakaran (Putri, 2023).

Saraswati dan Cahyono (2017) menyoroti perlunya mitigasi risiko bencana yang efektif sebagai sarana persiapan evakuasi jika terjadi bencana, oleh karena itu Kota Surabaya dinilai memiliki potensi bencana non-alam yang tinggi karena kepadatan penduduknya yang relatif tinggi. Meskipun bencana non-alam seperti

kebakaran sering terjadi, namun air pasang dan tsunami merupakan ancaman terbesar bagi Kota Surabaya, sehingga para pengambil kebijakan terkait harus memberikan perhatian penuh pada isu ini (Saraswati & Cahyono, 2017).

Data BNPB tahun 2021 mencatat 10 propinsi terbanyak menyalami bencana adalah Jawa Barat (1.368 kejadian), Jawa Tengah (622 kejadian) dan Jawa Timur (366 kejadian). Kejadian kasus kebakaran tahun 2023 tercatat 309 kasus kebakaran di Surabaya, Jawa Timur. Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional – Provinsi Jawa Timur 2022-2026 menunjukkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur memiliki bahaya yang tinggi. Kejadian kebakaran di Jawa Timur. Menurut data yang diterima BNPB bahwa selama bulan Agustus 2023 ini 5 kabupaten terbanyak dilanda bencana karhutla antara lain : Belitong Timur (10 kejadian), Belitong, Penajem Paser Utara, Majalengka (8 kejadian), dan Aceh Besar (6 kejadian). Rincian penyebab kasus kebakaran tahun 2023 di Surabaya didapatkan dari 5 peristiwa kebakaran industri, 41 kebakaran rumah, 74 kebakaran sampah, 116 kebakaran lahan terbuka, dan 73 kebakaran lainnya. Risiko kebakaran juga akan semakin meningkat dalam musim kemarau ketika cuaca kering (Nurdianssyah & Nurwati, 2024).

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan inovasi pelayanan publik. Salah satunya adalah Layanan Pemadam Kebakaran Cepat Tanggap 7 Menit Kota Surabaya atau yang dikenal dengan Roti 7 Lapis yang merupakan bagian dari Program Inovasi Pelayanan Publik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya. Selain itu, program Roti 7 Lapis juga mendapat apresiasi baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Upaya ini merupakan salah satu dari 45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2022. Inovasi Pelayanan Publik tersebut meliputi 45 Inovasi Terbaik dari kelompok umum dan lima peraih Prestasi Inovasi Pelayanan Publik dari kelompok khusus. Berprestasi Terbaik. Keputusan Menteri PANRB Nomor 289 Tahun 2022 tentang KIPP Inovasi Pelayanan Publik Terbaik pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2022 menjabarkan metodologi pemilihan Inovasi Terbaik (Mubyarsah, 2022).

Namun, program ini tidak tercakup dalam regulasi utama yang dapat membuat kerja sama dengan pihak lain menjadi lebih efektif. Karena dalam Peraturan Walikota tidak disebutkan secara rinci landasan kerja sama program Roti 7 Lapis, maka dapat dikatakan bahwa indikator dasar kerja sama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya masih lemah. Artinya, Visi Misi Kota Surabaya yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya 2021–2026 menjadi satu-satunya landasan pelaksanaan kerja sama antar pemangku kepentingan (Assyilah et al., 2023).

Penelitian terdahulu terkait kolaborasi dilakukan oleh Basyar & Puspaningtyas (2022) yang menunjukkan bahwa *Collaborative governance* merupakan solusi untuk menyelesaikan beberapa masalah public yang melibatkan beberapa actor yaitu peran swasta dan masyarakat yang dapat berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah public (Basyar & Puspaningtyas, 2022). Relevan dengan penelitian yang diberikan oleh Herdiansah (2021) yang menyatakan bahwa secara umum kegiatan workshop penerapan konsep *pentahelix* pada manajemen kewirausahaan Desa Margamekar berjalan sesuai rencana dan harapan. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno & Anitasari (2019) Bagian analisis ini menunjukkan bahwa strategi di antara para pemangku kepentingan sangat beragam, dengan masyarakat dan pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi yang paling berpengaruh. Ia menjelaskan dalam penelitiannya bahwa potensi dan strategi ekonomi kreatif menggunakan strategi *pentahelix*, dan peran pemerintah adalah memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan dan menetapkan regulasi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kesenjangan hasil penelitian terdahulu di atas menyiratkan makna bahwa masih terjadi

inkonsistensi penelitian yang membahas terkait kolaborasi *stakeholder* utamanya yang disinergikan dengan konsep *pentahelix*. Artinya, penelitian ini masih memiliki signifikansi penelitian yang bersifat urgent untuk dianalisa. Kritik atas *practical* dan *empirical gap* yang dimuat dalam penelitian ini akan menjadi sebuah *novelty* sebagai bentuk kontribusi dari hasil riset yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif evaluatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel melalui fokus penelitian. Jenis deskriptif evaluatif menganut paham fenomenologis, yakni mengkaji penampakan atau fenomena yang mana antara fenomena dan kesadaran terisolasi satu sama lain dan selalu berhubungan secara dialektis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Fokus penelitian diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question*.

Penelitian ini melibatkan 14 informan dengan prosedur pemilihan informan berdasarkan kriteria yang ditentukan dan berdasarkan pembagian *stakeholder* yaitu pemerintah, akademisi, pengusaha, media dan komunitas. Setelah mengelompokkan informan tersebut maka ditentukan informan adalah orang-orang yang dianggap memahami tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dari hasil pengamatan dan analisa pendahuluan dilapangan, orang-orang yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan dalam penelitian ini.

Kriteria inklusi informan :

- Mampu berkomunikasi dengan baik
- Bersedia menjadi informan
- Pernah berkontribusi dalam mitigasi bencana
- Berada di wilayah kerja Kota Surabaya

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* terhadap kelompok pelaku industri yang terbagi menjadi tiga bagian. Instrumen

penelitian yang digunakan wawancara berdasarkan teori model kolaborasi stakeholder pentahelix dengan fokus pertanyaan pada latar belakang informan, pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana, serta melakukan wawancara mendalam terkait persepsi informan terhadap kegiatan kolaborasi stake holder dalam mitigasi bencana. Penelitian ini dilakukan di Surabaya pada bulan November - Desember 2024. Keabsahan data penelitian menggunakan Kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmasi. Pada penelitian ini, untuk menjaga kredibilitas penelitian, digunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan tiriangulasi teori. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu pengodean terbuka, aksial, dan selektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga

Tugas pokok dan tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pendorong yang dikaji dalam Renstra K/L. Terkait dengan hal tersebut, berikut ini disajikan tabel 1 uraiannya.

Tabel 1 . Analisis SWOT Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya

Kekuatan/ Strengths	Kelemahan/ Weakness
(1)	(2)
1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Kebakaran daerah Kabupaten/ Kota	1. Belum terpenuhinya Jumlah Pos Pembantu dalam rangka memenuhi 100% jangkauan dalam Analisis WMK (Wilayah Manajemen Kebakara) Kota Surabaya
2. Kewenangan dalam penanggulangan dan mitigasi bencana kebakaran sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya	2. Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran yang perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan mitigasi bencana kebakaran
	3. Perencanaa n Kebutuhan Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang masih kurang

Kekuatan/ Strengths	Kelemahan/ Weakness
(1)	(2)
Nomor 39 Tahun 2018 tentang Prubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamat an Kota Surabaya	
3. Kecepatan dalam hal Response Time di Kota Surabaya yakni 7 menit di bawah standar nasional 15 menit	
4. Dukungan Sarana dan Prasarana baik jumlah Rayon dan Pos, Unit Pemadam dan Peralatan yang mendukung	
5. Dukungan SDM yakni Aparatur Pemadam Kebakaran yang handal	
6. Adanya SOP Penangulan gan Bencana Kebakaran	
7. Dukungan Informasi dengan adanya Command Center 112	

Peluang/ Opportunities	Ancaman/ Threats
(3)	(4)
1. Dukungan Pemerintah Pusat/Provin si, OPD Kab/Kota, Jajaran dan Lembaga lainnya dalam hal penanggulan gan bencana kebakaran	1.Masih ada cakupan daerah yang belum terjangkau sesuai Analisis WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) Kota Surabaya
2. Partisipasi masyarakat dalam mendukung penanggulan gan mitigasi bencana kebakaran	2.Kondisi Pemukiman Warga dengan fasilitas keamanan seperti polisi tidur ataupun portal gang/jalan yang menghambat masuknya unit dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran
3. Kecepatan Respon Kepala Daerah terhadap Penanggula ngan dan mitigasi bencana kebakaran	3.Kelengkapan Sistem Proteksi Kebakaran di Bangunan/ Gedung yang perlu dipantau secara berkala
8. Perkembang an Teknologi dan Sistem Penanganan Kebakaran dengan adanya unit taktis dan teknik pemadaman sesuai perkembangan mitigasi bencana kebakaran	4. Pemahaman Masyarakat masih kurang tentang potensipotensi kebakaran dan

Kekuatan/ Strengths	Kelemahan/ Weakness
(1)	(2)
	faktor penyebab serta cara penanggulangan dini yang dapat dilakukan

Sumber: Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya (2021-2026)

Sasaran jangka menengah Renstra K/L adalah Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran, Permasalahan Pelayanan ODP Provinsi/ kabupaten adalah penurunan Kejadian Kebakaran secara signifikan

Penentuan Issu Strategis

Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah :

- Masing-masing bagian dalam SKPD berkomitmen kuat untuk memajukan SPKD yang didukung dengan pejabat struktural dan pejabat fungsional yang profesional dan kompeten;
- Dukungan SDM yang handal sesuai bidang tugasnya;
- Dukungan sarana prasarana yang memadai bagi SDM pemadam kebakaran;
- Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Surabaya;
- Perlunya informasi yang akurat dan pemanfaatan teknologi tentang mitigasi bencana;
- Pengadaan sarana dan prasarana kebakaran sesuai dengan kebutuhan dinas dan pemenuhan tercapainya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Surabaya
- Dukungan dinas dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Analisis Hasil

a. Pra Bencana

1) Pemerintah

Hasil wawancara dengan stakeholder pemerintah didapatkan hasil ketika dalam situasi tidak ada bencana, perencanaan manajemen bencana dilakukan didasari oleh hasil evaluasi pada kejadian-kejadian sebelumnya dan juga sekaligus merancang strategi baru

menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang terkini baik menyangkut populasi penduduk, keberadaan pemukiman penduduk, peta pedagang kaki lima, lokasi tempat berkumpulnya sampah, hingga RTH yang menjadi paru paru kota dan penyimpan cadangan air sebagai sumber hidran

2) Akademisi

Hasil wawancara dengan stakeholder akademisi mendapatkan hasil ketika narasumber akademisi memiliki peran yang saling melengkapi dimana satu pihak berperan sebagai sosok yang melakukan kajian dan riset, dimana pihak lainnya berperan dalam memberikan wawasan dan arahan ketika menjadi narasumber dalam acara sosialisasi pencegahan bencana kebakaran di Kota Surabaya.

3) Pebisnis

Hasil wawancara dengan stakeholder pebisnis mendapatkan hasil bahwa pebisnis juga memiliki peran dalam aktivitas pencegahan ketika dalam situasi tidak ada bencana. Minimal mereka mempersiapkan di wilayah kerja mereka sendiri, sebelum memikirkan wilayah sekitar. Karena dengan wilayahnya di jaga keamanannya dari kebakaran, maka secara tidak langsung juga akan menjaga lingkungan sekitar dari potensi rembetan bencana kebakaran yang akan terjadi

4) Media

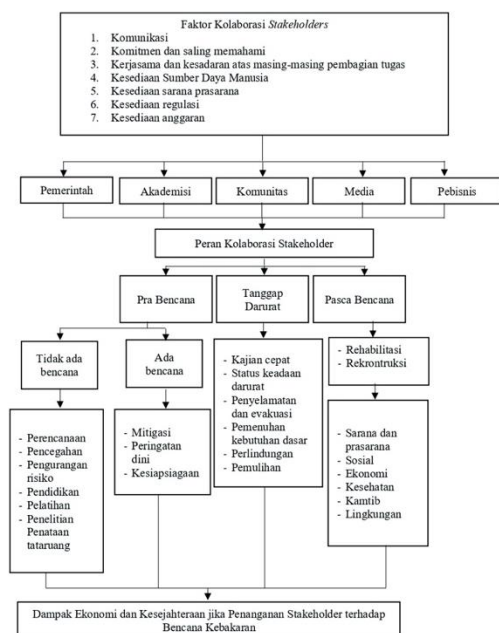
Hasil wawancara dengan stakeholder media mendapatkan hasil bahwa media ini memiliki peran yang sama dalam mendukung kegiatan pencegahan bencana kebakaran di Kota Surabaya pada situasi sedang tidak terjadi bencana. Hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa telah terjadi kolaborasi stakeholder antara pemerintah dan media meskipun tidak dilakukan secara intensif.

- 5) Komunitas
Hasil wawancara dengan stakeholder komunitas mendapatkan hasil bahwa erdapat komunitas-komunitas di Kota Surabaya yang juga turut berperan dalam membantu para stakeholder yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen bencana kebakaran. Komunitas-komunitas tersebut dengan sukarela melakukan kegiatan mulai dari kegiatan sosial untuk bersih-bersih lingkungan, hingga sosialisasi masalah pencegahan kebakaran di Kota Surabaya
- b. Pada Saat Tanggap Darurat
 - 1) Pemerintah dan Komunitas
Dalam situasi tanggap darurat atau terjadi bencana, para stakeholder juga sudah memiliki konsep untuk melakukan kolaborasi dalam penanganan bencana kebakaran tersebut. Sebab mereka menyadari bahwa dalam menangani musibah bencana kebakaran ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak.
- c. Pasca Bencana
 - 1) Pemerintah
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh informasi yang bersumber dari *stakeholder* pemerintah menunjukkan bahwa *stakeholder* pemerintah antar institusi sudah terjadi koordinasi dan kolaborasi. Akan tetapi dari kolaborasi yang terjadi masih belum mampu meminimalisir kejadian kebakaran di Kota Surabaya dan belum juga sepenuhnya mampu melahirkan konsep manajemen bencana kebakaran yang holistik mulai dari pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana yang efektif dan efisien.
 - 2) Pebisnis
Berdasarkan pendapat yang ditemukan adalah pada dasarnya stakeholder pebisnis pada dasarnya telah melakukan kolaborasi dengan pihak pemerintah dalam kegiatan penanganan bencana kebakaran di Kota Surabaya yakni dengan memberikan dukungan melalui *mensupport* pengadaan APAR dan secara mandiri melakukan mitigasi risiko kebakaran dengan penataan instalasi listrik yang aman, penggunaan peralatan yang mengandung api dengan bijak dan juga himbauan untuk berhati-hati dan waspada dalam hal apapun yang berpotensi menimbulkan musibah kebakaran
 - 3) Akademisi
Berdasarkan petikan wawancara kepada akademisi dapat diketahui bahwa sudut pandang akademisi dalam melihat urgensi kolaborasi stakeholder dalam manajemen bencana kebakaran di Kota Surabaya ini cukup tinggi dan tidak bisa di lakukan oleh beberapa pihak saja. Namun, proses manajemen bencana ini harus dilakukan secara holistik dimana kebijakan dan regulasi di terbitkan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah melalui dinas-dinas nya juga bertanggung jawab akan hal tersebut, yang di support oleh akademisi sebagai pihak yang melakukan riset dan analisa. Selanjutnya masalah sosialisasi dan publikasi di lakukan oleh pemerintah didukung oleh peran media serta pers. Lalu implementasi di lapangan di amati dan dirasakan langsung oleh komunitas, tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat
 - 4) Media
Berdasarkan triangulas pada informan mediai dapat disimpulkan bahwa pendapat dari kedua informan memiliki makna yang saling mendukung, dimana kedua perwakilan media yang menjadi informan dalam penelitian ini sama-sama menjadi pendukung proram manajemen bencana dari Pemerintah Kota Surabaya dengan lebih mementingkan update dan akurasi informasi yang di butuhkan masyarakat demi tercapainya tujuan manajemen kebakaran di Kota Surabaya.

5) Komunitas

Pada pendapat informan komunitas memiliki makna yang saling mendukung, dimana kedua perwakilan komunitas yang menjadi informan dalam penelitian ini sama-sama menjadi pendukung program manajemen bencana dari Pemerintah Kota Surabaya dengan membantu peran serta petugas yang menangani bencana kebakaran meskipun hanya ketika terjadi bencana saja

Pada tahap perencanaan situasi tidak ada bencana kebakaran kegiatan perencanaan diinisiasi oleh 4 (empat) stakeholder dari pemerintah yakni 1) Dinas Kebakaran Kota Surabaya, 2) Satpol PP Kota Surabaya, 3) Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas Kota Surabaya dan 4) Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya. Berikut akan disajikan data hasil wawancara pada stakeholder pemerintah tersebut, selengkapnya sebagai berikut:



Gambar 1. Peran Kolaborasi Antar Actor *Pentahelix*

Kelemahan Kolaborasi Stakeholder dalam Penanganan Bencana Kebakaran di Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan masyarakat Kota Surabaya dengan aktivitasnya yang kompleks membutuhkan penanganan

ke daruratan yang andal dan serba bisa. Pemerintah kota menjawab kebutuhan tersebut dengan kecepatan tindak lanjut setiap laporan warganya. Mulai dari penanganan kecelakaan, bencana alam, hingga kebakaran.

Dalam implemetasi kolaborasi stakeholder pentahelix ini untuk tujuan manajemen bencana kebakaran terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat :

- Pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan dan alat keamanan warga saat pelaksanaan pemadaman kebakaran di tempat kejadian kebakaran;
- Adanya area lahan kosong dan alang-alang yang tidak diperhatikan dan berpotensi menjadi titik kebakaran di Kota Surabaya secara sengaja maupun tidak sengaja.
- Kemajuan Kota Surabaya yang berdampak pada perkembangan tata ruang wilayah terutama terkait perkembangan sarana dan prasarana transportasi dan lalu lintas jalan kota;
- Kurangnya penataan dan penertiban fasilitas kewanman di permukiman warga seperti polisi tidur hingga portal gang/jalan yang dapat menghambat perjalanan dan kedatangan unit dan personil pemadam kebakaran ke tempat kejadian kebakaran;
- Kurangnya unit mobil taktis pemadam kebakaran yang bisa menjangkau permukiman padat penduduk di wilayah Kota Surabaya.

2. Faktor Pendukung

- Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Surabaya;
- Dukungan SDM
- Dukungan sarana dan prasarana, baik gedung, unit kendaraan operasional maupun peralatan pendukung lainnya

Hasil analisis SWOT kolaborasi stakeholder dalam penanganan bencana di Surabaya

1. Kekuatan (*Strength*)

- Pemerintah memiliki kesiapan dalam memenuhi kebutuhan dasar korban bencana
- Pebisnis di Surabaya memiliki andil untuk menyumbangkan bantuan mencakup pakaian,

- makanan dan kelengkapan sehari-hari
- Memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dalam mitigasi bencana
- 2. Kelemahan (*Weakness*)
 - Belum memiliki alur regulasi yang menaungi pembagian tugas kolaboratif dalam penanganan bencana di Surabaya sehingga sering terjadinya peran ganda *stakeholder* yang berdampak pada keberhasilan mitigasi bencana.
 - Pelaksanaan masih berfokus pada saat terjadinya bencana.
 - Pembagian alokasi pendanaan dikhususkan pada saat terjadinya bencana
 - Minimnya edukasi kepada komunitas terkait tindakan yang harus dilakukan saat terjadinya bencana.
- 3. Kesempatan (*Opportunity*)
 - Pemerintah memiliki program yang inovatif dalam penanganan bencana yaitu “Roti 7 Lapis”
 - Peningkatan kolaborasi antar instansi yang menyebabkan semangat tinggi para pemangku kebijakan untuk memberikan kontribusi dalam penanganan bencana
- 4. Ancaman (*Threats*)
 - Jumlah penduduk yang semakin meningkat
 - Tata Kelola lahan yang kurang maksimal
 - Lemahnya koordinasi dari eksternal (masyarakat) dalam penanganan bencana

Berdasarkan analisis SWOT kolaborasi *stakeholder* terhadap bencana kebakaran didapatkan rekomendasi bahwa :

1. Perlu adanya prosedur tetap yang berisi alur dan peran masing-masing *stakeholder*.
2. Perlu adanya pendekatan terhadap komunitas dalam melakukan penanganan pada saat bencana .
3. Perlu adanya anggaran khusus untuk mitigasi bencana secara keseluruhan.

Penunjang hasil ini ditunjukkan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun

2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Dalam RISPK ini ditetapkan oleh Walikota dan berlaku hingga 10 tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali.

Dalam RISPK ini berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan. Adanya peraturan daerah Surabaya No .2 tahun 2020. Tidak hanya itu, dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan mengacu pada hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya, masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan masyarakat secara umum juga memiliki peran serta yang krusial dalam manajemen kebakaran di Kota Surabaya. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah dengan turut serta melakukan upaya penanggulangan kebakaran di lingkungannya.

Secara teori, *Pentahelix* merupakan pengembangan dari pendekatan *triple helix* yang melibatkan organisasi nirlaba dan aspek-aspek lain dari masyarakat untuk mencapai inovasi. Diharapkan bahwa upaya kerja sama ini akan terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumberdaya yang berinteraksi secara sinergis. *Triple Helix* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995, Pendekatan *Triple Helix* dipresentasikan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff dan mencakup komponen dari pemerintah, sektor bisnis, dan sektor akademis. (Herdiansah, 2021; Rahu, 2019).

Efektifitas kolaborasi *pentahelix* yang didukung oleh beberapa sumber daya yang bekerja sama akan terwujud melalui kolaborasi yang sinergis. Kontribusi dari lima bagian penyusun *Penta Helix* saling terkait dan meliputi: (Haifani & Paripurno, 2022):

- a) Akademisi (*academics*) adalah dalam manajemen bencana kebakaran dalam penelitian ini berperan sebagai pihak yang membantu pemerintah dalam melakukan kajian tentang kebijakan, regulasi atau peraturan hukum serta implementasi manajemen bencana yang sudah dilakukan dinas-dinas atau instansi terkait sehingga kedepannya

bisa menghasilkan kebijakan yang lebih bernilai tambah dan mampu lebih baik dari pelaksanaan manajemen bencana sebelumnya.

- b) Bisnis (*business*) atau pebisnis dalam hal ini berperan dalam mendukung kebijakan pemerintah dengan bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dalam pengadaan APAR, kemudian juga bekerjasama dengan PLN terkait keamanan instalasi listrik dan juga kegiatan-kegiatan CSR yang berorientasi pada kepedulian lingkungan demi terhindarnya wilayah Kota Surabaya dari bencana kebakaran
- c) Komunitas (*community*) adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan masalah atau kasus yang berkembang. Dalam hal ini adalah dukungan terhadap manajemen bencana kebakaran yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Komunitas peduli lingkungan yang menjadi perwakilan informan ini adalah kelompok masyarakat yang menyatukan visi dengan menjaga lingkungannya dari musibah kebakaran seperti mengamati pohon-pohon rawan tumbang dan dilintasi kabel bertegangan tinggi, dan melaporkan jika terjadi bencana pohon tumbang dan lain sebagainya. Kemudian komunitas relawan kebencanaan yang merupakan perkumpulan masyarakat yang memiliki daya tanggap tinggi ketika terjadi bencana kebakaran dan melakukan tindakan preventif sebelum petugas pemadaman kebakaran datang.
- d) Pemerintah (*government*) adalah salah satu stakeholders yang memiliki regulasi dan *reponsibility* dalam manajemen kebencanaan. Mula dari institusi yang bersinggungan langsung dengan bencana kebakaran, polres sebagai pihak yang akan berperan ketika dalam bencana kebakaran tersebut diduga ada unsur kriminaitas, satpol PP sebagai pihak penertiban dinas perumahan dan pemukiman dan tata ruang yang berperan dalam meninjau kelayakan rumah penduduk dan aksesibilitasnya

ketikaterjadi bencana. Serta dinas-dinas terkait yang berperan mengatur manajemen bencana mulai fase sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan bagaimana pemulihannya setelah terjadi bencana.

- e) Media (*media*) adalah pemangku kepentingan yang memiliki informasi lebih untuk mengembangkan menjadi pendukung proram manajemen bencana dari Pemerintah Kota Surabaya dengan lebih mementingkan update dan akurasi informasi yang di butuhkan masyarakat demi tercapainya tujuan manajemen kebakaran di Kota Surabaya.

Saat ini langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mitigasi resiko kebakaran tersebut adalah menyiagakan selama 24 jam 650 petugas DPKP Surabaya beserta 76 unit kendaraan. Selain itu, para petugas tetap berlatih penyelamatan dalam kedaruratan dan tali temali serta rutin mengecek peralatan dan kelengkapan. Petugas juga rutin berkeliling ke kampung-kampung untuk melakukan sosialisasi mengenai risiko kebakaran. Hal itu penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang upaya pencegahan kebakaran.

Dampak Ekonomi dan Kesejahteraan jika Penanganan Stakeholder terhadap Bencana Kebakaran tidak Berjalan dengan Baik

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kerugian ekonomi yang terdampak kebakaran cukup tinggi. Peran *stakeholder* dalam mitigasi bencana kebakaran masih lemah karena kurang memprioritaskan perkembangan ekonomi.

Sektor industri adalah pelaku yang bertugas menciptakan inovasi. Sektor universitas adalah pelaku yang bertugas menciptakan pengetahuan. Selanjutnya, berkomunikasi dengan pemerintah, yang merupakan sektor ketiga. Ketiganya berkolaborasi menggunakan strategi top-down untuk mengembangkan inovasi yang dapat meningkatkan keadaan ekonomi suatu negara (Rahu & Suprayitno, 2021).

Paradigma pertumbuhan ekonomi ini mensyaratkan kolaborasi lintas lima sektor yang berbeda, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda untuk dimainkan. Salah satu indikator efektivitas model ini adalah adanya sinergi dan dedikasi yang kuat terhadap kerja

sama di antara para pemangku kepentingan. Fungsi konseptual akademisi dalam model *Penta Helix* adalah untuk menstandarisasi proses bisnis dan mensertifikasi produk serta kemampuan sumber daya manusia. Infrastruktur TIK disediakan oleh bisnis sebagai enabler. ukuran keberhasilan model ini. Dengan melakukan standarisasi prosedur perusahaan dan sertifikasi barang dan kemampuan sumber daya manusia, akademisi memiliki peran konseptual dalam model *Penta Helix*. Bisnis menawarkan infrastruktur TIK sebagai enabler., dengan mendukung perubahan pada sumber daya manusia, proses bisnis dan produk yang dihasilkan ke era digital. Komunitas berperan sebagai akselerator sebagai sarana untuk berfungsi sebagai penghubung antara pemangku kepentingan dan membantu dalam adaptasi prosedur perusahaan ke era digital. Pemerintah mengatur semua pihak yang terlibat dan berfungsi sebagai regulator dengan aturan. Media berfungsi sebagai saluran informasi dan promosi publikasi. (Ishak & Sholehah, 2021; Kurnia et al., 2023; D. D. F. Putri et al., 2024).

Diharapkan bahwa sebuah penemuan yang didukung oleh beberapa sumber daya yang bekerja sama akan terwujud melalui kolaborasi yang sinergis. Kontribusi dari lima bagian menyusun *Penta Helix* saling terkait.

PENUTUP

Kelemahan Kolaborasi Stakeholder dalam Penanganan Bencana Kebakaran di Surabaya adalah pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan dan alat keamanan warga saat pelaksanaan pemadaman kebakaran di tempat kejadian kebakaran, adanya area lahan kosong dan alang-alang yang tidak diperhatikan dan berpotensi menjadi titik kebakaran di Kota Surabaya secara sengaja maupun tidak sengaja, kemajuan Kota Surabaya yang berdampak pada perkembangan tata ruang wilayah terutama terkait perkembangan sarana dan prasarana transportasi dan lalu lintas jalan kota dan Kurangnya unit mobil taktis pemadam kebakaran yang bisa menjangkau permukiman padat penduduk di wilayah Kota Surabaya. Dampak ekonomi dan kesejahteraan jika penanganan stakeholder terhadap bencana kebakaran tidak berjalan dengan baik adalah kerusakan fisik pada infrastruktur. Api yang berkobar tidak membedakan antara bangunan residensial, komersial, atau industri. Semuanya bisa rata dengan tanah dalam hitungan jam. Penyebab kebakaran kota tidak hanya

menghancurkan bangunan, tapi juga risiko kesehatan serius. Asap dan debu yang dihasilkan dapat menyebabkan masalah pernapasan akut, penyakit jantung, dan komplikasi kesehatan lainnya. Ekonomi lokal bisa terpukul oleh kebakaran. Kerugian properti dan infrastruktur memerlukan dana yang besar untuk pembangunan kembali. Kegiatan bisnis juga terganggu dan mengakibatkan hilangnya pendapatan serta pekerjaan.

Rekomendasi yang didapatkan dari penelitian ini adalah *stakeholder* dapat mengembangkan ilmu dalam penanganan bencana kebakaran di kota surabaya sehingga pengembangan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan SOP atau juklak manajemen bencana kebakaran dari dinas terkait. Pembentukan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, dan juga update dukungan anggaran serta sarana-prasarana yang cukup untuk mewujudkan kolaborasi penanganan bencana kebakaran yang kondusif. Perlunya kontribusi pemikiran dimana masing-masing stakeholder mampu melakukan manajerial sesuai dengan fungsinya. Misalkan pihak dinas kebakaran, memiliki dukungan MoU dengan masing-masing stakeholder sebagai mitra dalam penanganan bencana kebakaran dengan batasan-batasan dan beban tanggung jawab tertentu yang disebutkan secara jelas dan gamblang dalam MoU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyilah, S. S., Novaria, R., & Wahyudi, E. (2023). Kolaborasi Pelayanan Program “Roti 7 Lapis” sebagai Upaya Aksi Cepat Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 03(02), 127–136.
- Fernalia, Anggita, K. D., & Fefrylia, L. (2023). Pendirian Pos Kesehatan Pertama Dan Bantuan Makanan Bagi Korban Banjir Kelurahan Semarang Kota Bengkulu. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6(2), 676–686.
- Mubyarsah, L. R. (2022). Pemkot Surabaya Tingkatkan Performa Pelayanan Publik. In *31 Juli* (p. 1). Jawapos.com.
- Nugroho, S. S., Pasaribu, D., Fadiyah, D., & Andini, L. A. (2023). Tata Kelola Bencana Non Alam Di Indonesia: Temuan Awal.

Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 4(1), 13–26.

Nurdianssyah, M. I., & Nurwati, D. (2024). Kebijakan Pemimpin Kota Surabaya Terhadap Penanggulangan Bencana. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(10), 1–17.

Putri, D. E. (2023). Kesiapsiagaan Masyarakat Surabaya Terhadap Potensi Bencana Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 278.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4437>

Saraswati, D. F., & Cahyono, A. B. (2017). Analisis Daerah Risiko Bencana Kebakaran di Kota Surabaya dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), 1–4.
<https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.24410>